

2026

Anggota Badan Pengarah Papua
Pokja Papua Cerdas
Pokja Papua Sehat
Pokja Papua Produktif
Pokja Papua Polhukam



LAPORAN BULANAN JANUARI

BADAN PENGARAH PAPUA
PROVINSI PAPUA



Ringkasan Eksekutif

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua sepanjang bulan Januari 2026 melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang terfokus pada empat klaster utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Kegiatan tersebut meliputi peninjauan langsung fasilitas pelayanan kesehatan, penancangan pusat studi budaya, publikasi dan penguatan Sekolah Rakyat, fasilitasi peremajaan sawit rakyat, pemberdayaan ekonomi Mama-Mama Papua, serta pemantauan distribusi logistik Pemilihan Umum.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak pada sektor kesehatan, khususnya terkait ketersediaan obat-obatan serta pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit. Pada klaster pendidikan dan budaya, BP3OKP berperan aktif dalam mendorong penguatan Sekolah Rakyat serta pelestarian budaya dan kearifan lokal. Sementara itu, pada klaster ekonomi, BP3OKP memperkuat kemitraan dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus Papua serta mendorong persatuan dan pembangunan ekonomi yang inklusif menuju Indonesia Emas. Pada aspek politik, hukum, dan keamanan, fokus diarahkan pada penguatan pengawasan, transparansi, dan peningkatan kapasitas aparatur melalui sinergi antara BP3OKP, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Inspektorat.

Rekomendasi utama dari seluruh rangkaian kegiatan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Melalui pelaksanaan dan tindak lanjut rekomendasi tersebut, BP3OKP menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pembangunan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan menuju visi Papua Emas 2041.




ALBERTH YOKU, S.Ag
Anggota BPP RI Provinsi Papua



1. Kegiatan Strategis




Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP telah melaksanakan kegiatan strategis sebagai berikut:
Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Diskusi bersama Gerakan Rakyat Cinta Indonesia terkait Menyampaikan hasil-hasil rakornas DPN Gercin Indonesia terkait meneguhkan persatuan dan mendorong transformasi pembangunan di enam provinsi tanah papua menuju indonesia emas 2045.	13.00 – selesai (8 Januari 2026)	<ul style="list-style-type: none"> • Meneguhkan persatuan nasional dan sinergi pembangunan di enam provinsi Tanah Papua. • Memperkuat koordinasi ormas dengan BP3OKP dalam mendukung percepatan Otsus menuju Indonesia Emas 2045. • Mendukung kebijakan pembangunan Papua melalui sinergi pusat–daerah dan peran masyarakat sipil dalam menjaga NKRI. 	<p>Sinergi BP3OKP – GERCIN untuk percepatan program Otsus melalui empat pilar: Papua Cerdas, Sehat, Produktif, dan Damai, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan dan kesehatan OAP terintegrasi dana Otsus. 2. Pengawasan penyerapan anggaran 2026 secara optimal. 3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar. 4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan (RIPPP 2022–2041 dan RAPPP). 5. Dukungan implementasi kewenangan khusus daerah melalui NSPK. 6. Dukungan pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri dan K/L terkait. 	


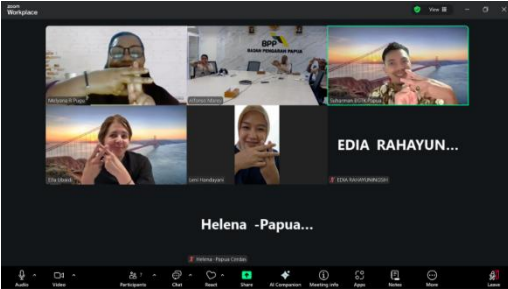


2	Pertemuan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.00 – 12.00 WIT (9 Januari 2026)	Diskusi Bantuan Sarpras Damkar Pemkot Jayapura	Pembuatan Dokumen Permohonan Bantuan yang akan di tindak lanjuti BPP	
3.	Menghadiri Perayaan Natal dan Lepas Sambut bersama Balai Bahasa Provinsi Papua	14.00 – 17.00 WIT (9 Januari 2026)	Koordinasi awal tahun Bersama UPT Kemendikdasmen, Pemerintah Daerah, & Lembaga Pendidikan lainnya	Agendakan Pertemuan lanjutan untuk masing-masing UPT, Pemda, & Lembaga terkait dalam waktu dekat	





4.	Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.	12 s.d. 15 Januari 2026	Mendampingi Ketua BP3OKP meninjau Asta Cita Presiden-Wakil Presiden	Kegiatan Kunjungan berlangsung baik & lancar	
5.	Kunjungan Kerja ke Sekolah Adat Negeri Papua Kabupaten Jayapura bersama	20 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none">• Meninjau Kondisi Fasilitas & Sarpras Sekolah adat Negeri Papua• Mendengar Penyampaian tentang Kurikulum & Modul Bahan Ajar yang di gunakan	<ul style="list-style-type: none">• Kondisi Sekolah Cukup Memprihatinkan• Modul sudah cukup membantu proses belajar mengajar (PBM) pada satuan Pendidikan di kabupaten Jayapura• Agendakan pertemuan berikut Bersama Sekolah Adat Negeri Papua di Kantor BPP	
6.	Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) guna menyelaraskan perencanaan program serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dan instansi terkait	21 Januari 2026	Rapat Pembahasan Perencanaan & Persiapan Rapat Koordinasi Teknis Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan Kegiatan akan bersumber dana dari BPP dan Badan Bahasa• Ditindaklanjuti dengan ToR dan Proposal disusun oleh Badan Bahasa dan dikoordinasikan dengan BPP.	



7.	Diskusi Pengembangan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Provinsi Papua, kendala pendanaan dalam memberikan Pelayanan kepada tanah pengajar bahasa ibu dan Operasional Sekolah	10.00 – 13.00 WIT 23 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none">• Diskusi Pengembangan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Provinsi Papua, kendala pendanaan dalam memberikan Pelayanan kepada tanah pengajar bahasa ibu dan Operasional.• Tindak Lanjut Kegiatan Tinjauan Lapangan sebelumnya.	Rapat menyepakati pentingnya penguatan kelembagaan Sekolah Adat Negeri Papua yang mencakup aspek regulasi, keuangan, organisasi, dan fasilitas sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Disepakati pula pengembangan model bisnis sekolah yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme pembayaran guru melalui sekolah formal serta revitalisasi guru bahasa daerah. Sebagai tindak lanjut, akan disusun biografi Sekolah Adat Negeri Papua, dilaksanakan pertemuan lanjutan dengan MRP dan DPR Otsus, serta FGD sosialisasi secara daring.	
8.	Kegiatan diskusi Noken bersama seluruh Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas se-BPP, meliputi sosialisasi SK Tim <i>Safeguarding</i> Papua serta sosialisasi urgensi perlindungan Noken Papua.	12.00 – 15.00 WIT 27 Januari 2026	Sosialisasi SK Tim <i>Safeguarding</i> Papua serta sosialisasi urgensi perlindungan Noken Papua.	<ul style="list-style-type: none">• Draft SK telah tersedia dan masih proses verifikasi untuk substansinya• Agendakan pertemuan berikut dengan MRP, Dewan Adat Papua, DPRP, DPRK, & Instansi Terkait	



9.	Rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Otsus Papua (Evaluasi 2025 & Rencana 2026)	10.00 – 13.30 WIT 28 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none">• Melihat Proses & Cara kerja Lembaga Pengawas & Pemeriksa dalam tata Kelola Pemerintahan• Penyamaan persepsi dalam menangani dana otsus	<ul style="list-style-type: none">• BPK Wilayah Papua terbuka untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut dalam kaitan pemeriksaan dana otsus.• Di agendakan pertemuan berikut dengan APIP dan Pemeriksa lebih intens.	
10.	<ol style="list-style-type: none">1. Paparan RSUD Dok II Jayapura terkait kekurangan obat-obatan dan langkah antisipasi.2. Dukungan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyediaan obat-obatan.3. Usulan program penyediaan obat-obatan Tahun 2026.	09.00 – 12.30 WIT 29 Januari 2026	Menyamakan pemahaman dan mencari solusi konkret atas kekurangan obat-obatan di RSUD Dok II Jayapura. Rapat ini juga bertujuan mengklarifikasi kondisi riil, dukungan anggaran dan kebijakan, serta merumuskan langkah tindak lanjut lintas instansi agar pelayanan kesehatan tidak terganggu dan bisa berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none">• Kekurangan obat-obatan di RSUD Dok II Jayapura disebabkan oleh kombinasi penurunan anggaran, kendala klaim BPJS, perencanaan pengadaan obat yang belum optimal, serta beban pelayanan yang tinggi.• BPP berperan sebagai wadah koordinasi dan sinergi, dengan semangat berbagi dan kolaborasi antarinstansi untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.	



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua

Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1	Diskusi bersama Gerakan Rakyat Cinta Indonesia terkait Menyampaikan hasil-hasil rakornas DPN Gercin Indonesia terkait meneguhkan persatuan dan mendorong transformasi pembangunan di enam provinsi tanah papua menuju indonesia emas 2045.	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan koordinasi DPR, MRP, dan DPD Papua untuk peningkatan SDM, infrastruktur, dan ekonomi daerah.• Peran aktif masyarakat sipil dalam menjaga NKRI dan pemerataan pembangunan.• Reformasi tata kelola pemerintahan melalui sinergi GERCIN-BP3OKP dengan fokus Papua Sehat, Cerah, Produktif, dan Damai.• Optimalisasi dana Otsus untuk ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar, dan pembangunan merata.
2	Pertemuan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pembuatan Dokumen Permohonan Bantuan yang akan di tindak lanjuti BPP
3	Menghadiri Perayaan Natal dan Lepas Sambut bersama Balai Bahasa Provinsi Papua	Agendakan Pertemuan lanjutan untuk masing-masing UPT, Pemda, & Lembaga terkait dalam waktu dekat
4	Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.	
5	Kunjungan Kerja ke Sekolah Adat Negeri Papua Kabupaten Jayapura bersama	Pertemuan lanjutan dengan Sekolah adat Negeri Papua membahas pengembangan sekolah
6	Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) guna menyelaraskan perencanaan program serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dan instansi terkait	Penyusunan Proposal & TOR serta Koordinasi lanjutan Bersama Badan Bahasa – Balai Bahasa Provinsi Papua
7	Diskusi Pengembangan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Provinsi Papua, kendala pendanaan dalam memberikan Pelayanan kepada tanah pengajar bahasa ibu dan Operasional Sekolah	Buat Dokumen Pengembangan Sekolah & Perbaiki Struktur - Tata Kelola yang lebih inklusif.
8	Kegiatan diskusi Noken bersama seluruh Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas se-BPP, meliputi sosialisasi SK Tim <i>Safeguarding</i> Papua serta sosialisasi urgensi perlindungan Noken Papua.	<ul style="list-style-type: none">• Reviu & Penyesuaian SK Tim Sesuai dengan Status Anggota Tim (Khusus PNS)• Agendakan bertemu Dewan Adat Papua, MRP, DPRP, DPRK, Lembaga yang berkaitan untuk Penyamaan Persepsi : Urgensi Pelindungan Noken Papua
9.	Rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Otsus Papua (Evaluasi 2025 & Rencana 2026)	Agendakan pertemuan rutin untuk monitoring penggunaan dana otsus




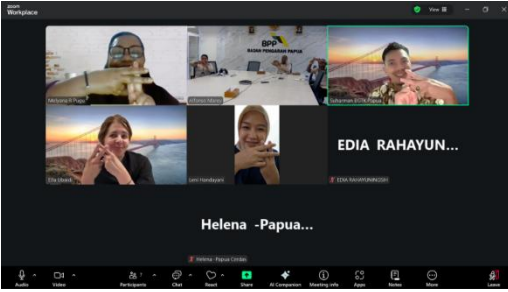
10	<ul style="list-style-type: none">• Paparan RSUD Dok II Jayapura terkait kekurangan obat-obatan dan langkah antisipasi.• Dukungan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyediaan obat-obatan.• Usulan program penyediaan obat-obatan Tahun 2026	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat perencanaan dan pengadaan obat berbasis kebutuhan riil dan tren penggunaan untuk mencegah kekosongan serta dead stock.• Menjamin ketersediaan buffer stock obat vital, khususnya obat layanan kritis.• Memperbaiki tata kelola dan percepatan klaim BPJS Kesehatan melalui peningkatan kelengkapan administrasi dan koordinasi.• Melakukan penyehatan keuangan RSUD melalui pendampingan manajemen dan percepatan pencairan anggaran.• Memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengawasan layanan kesehatan, termasuk pembentukan Komite Etik.
----	---	---



Kelompok Kerja
Papua Cerdas

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 - 2 Gambar)
1.	Kunjungan Kerja ke Sekolah Adat Negeri Papua Kabupaten Jayapura bersama.	20 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none">• Meninjau Kondisi Fasilitas & Sarpras Sekolah adat Negeri Papua• Mendengar Penyampaian tentang Kurikulum & Modul Bahan Ajar yang di gunakan.	<ul style="list-style-type: none">• Kondisi Sekolah Cukup Memprihatinkan• Modul sudah cukup membantu proses belajar mengajar (PBM) pada satuan Pendidikan di kabupaten Jayapura• Agendakan pertemuan berikut Bersama Sekolah Adat Negeri Papua di Kantor BPP.	
2.	Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) guna menyelaraskan perencanaan program serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dan instansi terkait.	21 Januari 2026	Rapat Pembahasan Perencanaan & Persiapan Rapat Koordinasi Teknis Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Papua.	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan Kegiatan akan bersumber dana dari BPP dan Badan Bahasa• Ditindaklanjuti dengan ToR dan Proposal disusun oleh Badan Bahasa dan dikoordinasikan dengan BPP.	



No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
3.	Diskusi Pengembangan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Provinsi Papua, kendala pendanaan dalam memberikan Pelayanan kepada tanah pengajar bahasa ibu dan Operasional Sekolah.	10.00 – 13.00 WIT 23 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none">• Diskusi Pengembangan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Provinsi Papua, kendala pendanaan dalam memberikan Pelayanan kepada tanah pengajar bahasa ibu dan Operasional.• Tindak Lanjut Kegiatan Tinjauan Lapangan sebelumnya.	Rapat menyepakati pentingnya penguatan kelembagaan Sekolah Adat Negeri Papua yang mencakup aspek regulasi, keuangan, organisasi, dan fasilitas sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Disepakati pula pengembangan model bisnis sekolah yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme pembayaran guru melalui sekolah formal serta revitalisasi guru bahasa daerah. Sebagai tindak lanjut, akan disusun biografi Sekolah Adat Negeri Papua, dilaksanakan pertemuan lanjutan dengan MRP dan DPR Otsus, serta FGD sosialisasi secara daring.	
4	Kegiatan diskusi Noken bersama seluruh Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas se-BPP, meliputi sosialisasi SK Tim <i>Safeguarding</i> Papua serta sosialisasi urgensi perlindungan Noken Papua.	12.00 – 15.00 WIT 27 Januari 2026	Sosialisasi SK Tim <i>Safeguarding</i> Papua serta sosialisasi urgensi perlindungan Noken Papua.	<ul style="list-style-type: none">• Draft SK telah tersedia dan masih proses verifikasi untuk substansinya• Agendakan pertemuan berikut dengan MRP, Dewan Adat Papua, DPRP, DPRK, & Instansi Terkait.	




Kelompok Kerja
Papua Cerdas



Nama Kegiatan	Rekomendasi
Kunjungan Kerja ke Sekolah Adat Negeri Papua Kabupaten Jayapura bersama	Pertemuan lanjutan dengan Sekolah adat Negeri Papua membahas pengembangan sekolah
Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) guna menelaraskan perencanaan program serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dan instansi terkait	Penyusunan Proposal & TOR serta Koordinasi lanjutan Bersama Badan Bahasa – Balai Bahasa Provinsi Papua
Diskusi Pengembangan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu Melalui Pendidikan Adat di Provinsi Papua, kendala pendanaan dalam memberikan Pelayanan kepada tanah pengajar bahasa ibu dan Operasional Sekolah	Buat Dokumen Pengembangan Sekolah & Perbaiki Struktur - Tata Kelola yang lebih inklusif.
Kegiatan diskusi Noken bersama seluruh Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas se-BPP, meliputi sosialisasi SK Tim <i>Safeguarding</i> Papua serta sosialisasi urgensi perlindungan Noken Papua	<ul style="list-style-type: none">• Reviu & Penyesuaian SK Tim Sesuai dengan Status Anggota Tim (Khusus PNS)• Agendakan bertemu Dewan Adat Papua, MRP, DPRP, DPRK, Lembaga yang berkaitan untuk Penyamaan Persepsi : Urgensi Pelindungan Noken Papua



Kelompok Kerja
Papua Polhukam

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Diskusi bersama Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (GERCIN) terkait Menyampaikan hasil-hasil rakornas DPN Gercin Indonesia terkait meneguhkan persatuan dan mendorong transformasi pembangunan di enam provinsi tanah papua menuju indonesia emas 2045.	13.00 – selesai (8 Januari 2026)	<ul style="list-style-type: none">• Meneguhkan persatuan nasional dan sinergi pembangunan di enam provinsi Tanah Papua.• Memperkuat koordinasi ormas dengan BP3OKP dalam mendukung percepatan Otsus menuju Indonesia Emas 2045.• Mendukung kebijakan pembangunan Papua melalui sinergi pusat–daerah dan peran masyarakat sipil dalam menjaga NKRI.	Sinergi BP3OKP – GERCIN untuk percepatan program Otsus melalui empat pilar: Papua Cerdas, Sehat, Produktif, dan Damai, dengan prioritas: <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan pendidikan dan kesehatan OAP terintegrasi dana Otsus.2. Pengawasan penyerapan anggaran 2026 secara optimal.3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar.4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan (RIPPP 2022–2041 dan RAPPP).5. Dukungan implementasi kewenangan khusus daerah melalui NSPK.6. Dukungan pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri dan K/L terkait.	



2.	Mendampingi Panitia Kongres Pemuda Adat Papua untuk Kordinasi dengan Sekda Papua terkait pelaksanaan Kongres Pemuda Adat Papua di Jayapura	08.00 – selesai (9 Januari 2026)	Memastikan kelancaran kegiatan serta memfasilitasi proses pemilihan Ketua Umum Pemuda Adat Papua yang baru.	Terpilihnya ketua umum Pemuda Adat Papua yg baru beserta pengurus pemuda adat papua periode 2025 – 2030.	
3.	Rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Otsus Papua (Evaluasi 2025 & Rencana 2026)	10.00 – 13.30 WIT 28 Januari 2026	Rapat memperkuat sinergi antar-APIP untuk transformasi pengawasan yang akuntabel, dengan komitmen bersama Gubernur-Bupati/Wali Kota melalui penandatanganan dukungan penuh terhadap fungsi pengawasan internal. Fokus utama meliputi akselerasi tindak lanjut temuan/rekomendasi pemeriksaan dan koordinasi pengawasan Dana Otsus 2026. Pengawasan tidak boleh hanya formalitas, melainkan	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Pengawasan 2026: BP3OKP koordinasi dengan BPK/Inspektorat susun prioritas pengawasan triwulanan (Q1: Absorpsi Pendidikan, Q2: Verifikasi Lahan Adat, Q3: Belanja Barang >Rp10M, Q4: Audit MRP/DPRK). • Dashboard Real-Time: Integrasikan Sismonev Otsus dengan Sistem APIP terpadu, target penyelesaian temuan 90% dalam 60 hari. • Kapasitas SDM: Pelatihan APIP lintas instansi (BPK-BP3OKP-Baperinda) tentang risiko mens rea aparat kunci dan tuntutan ganti rugi daerah. • MoU Operasional: Penandatanganan MoU BP3OKP-BPK RI 	 



			instrumen nyata mendorong tata kelola keuangan daerah yang bersih dan efektif.	Papua,inspektorat,dan Baperida untuk akses data LHP. • Perjanjian Kerjasama APIP dan Dukungan Pemeriksa Eskternal(BPK).	
--	--	--	--	--	--





Kelompok Kerja
Papua Polhukam


Nama Kegiatan	Rekomendasi
Diskusi bersama Gerakan Rakyat Cinta Indonesia terkait Menyampaikan hasil-hasil rakornas DPN Gercin Indonesia terkait meneguhkan persatuan dan mendorong transformasi pembangunan di enam provinsi tanah papua menuju indonesia emas 2045.	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan koordinasi DPR, MRP, dan DPD Papua untuk peningkatan SDM, infrastruktur, dan ekonomi daerah.• Peran aktif masyarakat sipil dalam menjaga NKRI dan pemerataan pembangunan.• Reformasi tata kelola pemerintahan melalui sinergi GERCIN–BP3OKP dengan fokus Papua Sehat, Cerah, Produktif, dan Damai.• Optimalisasi dana Otsus untuk ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar, dan pembangunan merata.
Mendampingi Panitia Kongres Pemuda Adat Papua untuk Kordinasi dengan Sekda Papua terkait pelaksanaan Kongres Pemuda Adat Papua di Jayapura	Melaporkan hasil kongres Pemuda Adat Papua kepada Gubernur Papua bahwa Pemuda Adat Papua mendukung program2 pemerintah baik daerah maupun pusat
Rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Otsus Papua (Evaluasi 2025 & Rencana 2026)	Perlu penguatan koordinasi, sistem pengawasan terpadu, dan peningkatan kapasitas SDM pengawas agar pengelolaan Otsus dan keuangan daerah Tahun 2026 lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini dilakukan melalui penetapan prioritas pengawasan yang jelas, pemanfaatan dashboard monitoring real-time, pelatihan APIP lintas instansi, serta penguatan kerja sama formal (MoU dan PKS) antara BP3OKP, BPK, Inspektorat, dan Baperida untuk percepatan tindak lanjut temuan pemeriksaan.



Kelompok Kerja
Papua Produktif

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Diskusi bersama Gerakan Rakyat Cinta Indonesia terkait Menyampaikan hasil-rakornas DPN Gercin Indonesia terkait meneguhkan persatuan dan mendorong transformasi pembangunan di enam provinsi tanah papua menuju indonesia emas 2045.	13.00 – selesai (8 Januari 2026)	Ormas Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (GERCI) menyampaikan laporan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang memuat capaian, evaluasi, serta rencana tindak lanjut program organisasi dalam mendukung penguatan persatuan dan kontribusi nyata bagi pembangunan, khususnya di wilayah Papua	Pertemuan terlaksana. Tempat : Lantai 5 Ruang Pertemuan BPP.	
2.	Pertemuan awal rencana diskusi Evaluasi lima tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua.	11.00 – 12.30 WIT (22 Januari 2026)	Evaluasi lima tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua yang dilaksanakan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua untuk menilai capaian, tantangan, serta arah kebijakan ke depan.	Pertemuan terlaksana. Tempa : Kant. Gob. Prov. Papua, Lantai 3.	



3.	Rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Otsus Papua (Evaluasi 2025 & Rencana 2026)	10.00 – 13.30 WIT 28 Januari 2026	Pertemuan bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). BPK & Inspektorat Prov. Papua.	Pertemuan terlaksana di lantai 5 GKN	 <p>The top photograph shows a group of people in white shirts seated around a long conference table in a meeting room. A banner for 'BPP BADAN PENGARAH PAPUA' is visible on the wall. The bottom photograph shows the same group of people standing together for a group photo in the same meeting room.</p>
----	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---




Kelompok Kerja
Papua Produktif

Nama Kegiatan	Rekomendasi
Diskusi bersama Gerakan Rakyat Cinta Indonesia terkait Menyampaikan hasil-hasil rakornas DPN Gercin Indonesia terkait meneguhkan persatuan dan mendorong transformasi pembangunan di enam provinsi tanah papua menuju indonesia emas 2045.	<ol style="list-style-type: none">1. GERCI menyatakan kesiapan menjadi mitra BPP dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus).2. BPP mendorong GERCI untuk melibatkan elemen pemuda secara aktif dalam pembangunan di era Otonomi Khusus.
Evaluasi lima tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua.	<ol style="list-style-type: none">1. BPP akan menyurati Sekretaris Daerah Provinsi Papua terkait pelaksanaan evaluasi Otonomi Khusus (Otsus), dengan memuat agenda serta materi evaluasi yang akan dibahas.2. Surat tersebut juga mencantumkan pihak-pihak yang akan dilibatkan sebagai peserta dalam kegiatan evaluasi dimaksud.
Rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Otsus Papua (Evaluasi 2025 & Rencana 2026)	<ol style="list-style-type: none">1. Kolaborasi dan Sinergi: BP3OKP, BPK, dan Inspektorat perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (BINWAS).2. Pengawasan Internal: Inspektorat Provinsi Papua perlu memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.3. Pengembangan Kapasitas: BP3OKP dan BPK perlu mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.4. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran.5. Pengawasan Eksternal: BPK perlu memperkuat pengawasan eksternal guna memastikan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Kelompok Kerja
Papua Sehat

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	<ol style="list-style-type: none">1. Paparan RSUD Dok II Jayapura terkait kekurangan obat-obatan dan langkah antisipasi.2. Dukungan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyediaan obat-obatan.3. Usulan program penyediaan obat-obatan Tahun 2026.	09.00 – 12.30 WIT 29 Januari 2026	Menyamakan pemahaman dan mencari solusi konkret atas kekurangan obat-obatan di RSUD Dok II Jayapura. Rapat ini juga bertujuan mengklarifikasi kondisi riil, dukungan anggaran dan kebijakan, serta merumuskan langkah tindak lanjut lintas instansi agar pelayanan kesehatan tidak terganggu dan bisa berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none">• Kekurangan obat-obatan di RSUD Dok II Jayapura disebabkan oleh kombinasi penurunan anggaran, kendala klaim BPJS, perencanaan pengadaan obat yang belum optimal, serta beban pelayanan yang tinggi.• BPP berperan sebagai wadah koordinasi dan sinergi, dengan semangat berbagi dan kolaborasi antarinstansi untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.	



Kelompok Kerja
Papua Sehat

Nama Kegiatan	Rekomendasi
<ol style="list-style-type: none">1. Paparan RSUD Dok II Jayapura terkait kekurangan obat-obatan dan langkah antisipasi.2. Dukungan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyediaan obat-obatan.3. Usulan program penyediaan obat-obatan Tahun 2026	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat perencanaan dan pengadaan obat berbasis kebutuhan riil dan tren penggunaan untuk mencegah kekosongan serta dead stock (RS Dok II dan Baperida)• Menjamin ketersediaan buffer stock obat vital, khususnya obat layanan kritis (Dinas Kesehatan)• Memperbaiki tata kelola dan percepatan klaim BPJS Kesehatan melalui peningkatan kelengkapan administrasi dan koordinasi (untuk BPJS)• Melakukan penyehatan keuangan RSUD melalui pendampingan manajemen dan percepatan pencairan anggaran.• Memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengawasan layanan kesehatan, termasuk pembentukan Komite Etik.



Kesimpulan:

Pelaksanaan berbagai kegiatan strategis BP3OKP Provinsi Papua sepanjang bulan Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui empat klaster utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan utama yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait tata kelola, akuntabilitas, serta pengawasan penggunaan dana Otsus di hampir seluruh sektor.

Kegiatan yang dilaksanakan mencakup penguatan pendidikan dan budaya berbasis kearifan lokal, revitalisasi bahasa daerah dan perlindungan noken Papua, peningkatan partisipasi pemuda dan organisasi masyarakat, penguatan tata kelola dan pengawasan Dana Otsus, serta upaya perbaikan layanan kesehatan melalui penanganan kekurangan obat-obatan di RSUD Dok II Jayapura. Rangkaian rekomendasi yang dihasilkan menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna memastikan pembangunan Papua yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Penutup

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menjadi fondasi strategis bagi terbangunnya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, aparat pengawas, serta masyarakat dan organisasi sipil dalam mendorong percepatan pembangunan Papua. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan dana Otonomi Khusus, serta memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan sinergi yang terbangun secara konsisten, diharapkan pembangunan Papua dapat berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi dasar penguatan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan Papua yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Adil menuju kesejahteraan Masyarakat Papua.